

Judul : Kuatkan nilai rupiah, otoritas moneter dan fiskal kudu kompak
Tanggal : Sabtu, 26 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kuatkan Nilai Rupiah

Otoritas Moneter Dan Fiskal Kudu Kompak

SENAYAN menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp 18 ribu per dolar Amerika Serikat (AS). Pada perdagangan Kamis (23/9/2026), rupiah sempat berada di sekitar Rp 17.901 per dolar AS.

Anggota Komisi XI DPR Amin Ak mengatakan, tekanan terhadap rupiah tidak boleh hanya dilihat sebagai angka di pasar valuta asing karena berdampak langsung terhadap biaya produksi dan harga barang. Kenaikan dolar akan menambah beban masyarakat di tengah upaya memulihkan daya beli.

"Ketika kurs melemah, harga bahan baku impor naik, biaya produksi industri membengkak. Dan pada akhirnya rakyat kecil serta pelaku UMKM yang paling merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari," kata Amin di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Amin menyebut, tekanan rupiah dipengaruhi faktor eksternal dan domestik. Faktor eksternal berupa, ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve, pergerakan imbal hasil aset dolar AS, serta perubahan persepsi risiko global dapat memengaruhi arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Sedangkan dari sisi domestik,

pasar membutuhkan kepastian mengenai arah kebijakan fiskal dan ekonomi Pemerintah.

Dinamika perubahan pejabat dan munculnya berbagai wacana kebijakan, menurut Amin, perlu diikuti komunikasi publik yang konsisten agar tidak menambah ketidakpastian. Karena pelaku pasar menginginkan kepastian arah kebijakan fiskal. Karena itu, diperlukan komunikasi yang tenang, jelas, terukur, dan konsisten, terutama dari Kementerian Keuangan (Kemkeu).

"Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu menunjukkan *policy coherence* (keselarasan kebijakan) agar kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan pasar keuangan tidak saling bertentangan," ujar politisi PKS ini.

Namun demikian, ia mendukung langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia melalui berbagai instrumen, termasuk Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Instrumen tersebut penting untuk meredam volatilitas dan mencegah pergerakan rupiah yang berlebihan.

"Tapi intervensi moneter memiliki keterbatasan apabila tidak disertai kepastian dan kredibili-



Amin Ak

tas kebijakan fiskal," kata Amin. BI lanjutnya, tidak bisa bekerja sendiri. Stabilitas rupiah adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, jangan meminta Bank Sentral terus-menerus menahan tekanan kurs sementara dari sisi fiskal muncul ketidakpastian baru.

Ia mengingatkan semua pihak jangan hanya berbicara bagaimana menahan rupiah hari ini. Yang lebih penting membangun kepercayaan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia konsisten, terukur, dan berkelanjutan. "Jadi kebutuhan intervensi yang besar dapat dikurangi," tandasnya.

Amin menilai, Indonesia masih memiliki sejumlah fundamental ekonomi yang dapat menjadi

jangkar bagi kepercayaan pasar, terutama inflasi yang relatif terkendali dan kerangka kebijakan moneter yang kredibel.

Amin mengingatkan, pelemahan rupiah dapat merambat melalui kenaikan harga barang impor dan bahan baku, kemudian meningkatkan biaya produksi industri dan UMKM. Pelaku usaha yang memiliki ruang terbatas untuk menyerap kenaikan biaya akhirnya terpaksa menaikkan harga, mengurangi margin, atau menekan produksi.

"Karena itu, stabilitas nilai tukar perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi, bukan semata-mata stabilitas sektor keuangan," saran legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Ia meminta Pemerintah dan BI memperkuat koordinasi komunikasi kebijakan, khususnya mengenai arah fiskal, moneter, pembiayaan APBN, pengelolaan utang, dan strategi menghadapi tekanan eksternal. Karena yang dibutuhkan pasar sekarang bukan pernyataan yang saling bersahutan, tetapi satu narasi kebijakan yang jelas. "Pemerintah dan BI perlu berbicara dalam bahasa yang sama mengenai stabilitas, pertumbuhan, inflasi, fiskal, dan nilai tukar," kata dia.

Bagaimana tanggapan BI? Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh ekspektasi penetapan kebijakan moneter AS di tengah kekhawatiran terhadap inflasi global dan outlook fiskal. Kondisi tersebut mendorong yield US Treasury 10 tahun naik hingga 5,11 persen, tertinggi sejak 2007.

"Selain faktor dari AS, tekanan terhadap rupiah juga berasal dari ketidakpastian konflik di Timur Tengah," kata Erwin dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

Kondisi tersebut, kata Erwin, meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak dunia sehingga harga minyak Brent kembali berada di atas 100 dolar AS per barel. Sedangkan dari dalam negeri, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga berasal dari meningkatnya kebutuhan valuta asing (valas) oleh importir menjelang akhir kuartal III 2026 dan arus keluar portofolio dari aset *emerging markets*.

Erwin memastikan, BI terus melakukan langkah stabilisasi untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap sesuai dengan fundamental ekonomi sekaligus memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik. ■ TIF